

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2024



DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA SEMARANG

KATA PENGANTAR

Kami ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2024. Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Penyusunan LKjIP ini berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kedua peraturan ini menjadi landasan bagi penyusunan LKjIP, sehingga laporan ini diharapkan dapat memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi yang ditetapkan.

LKjIP ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Melalui LKjIP ini, kami ingin menggambarkan penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta keberhasilan capaian sasaran dalam meningkatkan kualitas kinerja. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang selama tahun 2023.

Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah kami susun ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang di masa mendatang. Kami menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu ditingkatkan, dan laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi kami untuk terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kota Semarang.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA SEMARANG



IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai Rancangan RPJMD Kota Semarang 2021-2026, telah ditetapkan 5 (lima) program RPJMD Kota Semarang. Dari kelima program tersebut, terdapat 1 (satu) misi/program yang merupakan bagian penugasan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, yaitu: **“Mewujudkan Infrastruktur Yang Berkualitas Yang Berwawasan Lingkungan Untuk Mendukung Kemajuan Kota”**. Tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan dokumen Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah

1. Meningkatkan Manajemen Sumber Daya Air yang Berkelanjutan.
2. Meningkatkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang antara lain:

1. Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob.

Dengan meningkatnya kinerja sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob di Kota Semarang yang optimal diharapkan dapat terwujud Kota Semarang yang bebas dari banjir dan rob sehingga dapat meningkatkan kualitas Kota Semarang untuk mencapai kota yang tangguh, produktif dan berkelanjutan.

2. Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan.

Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan merupakan penunjang dalam aktivitas masyarakat kota Semarang untuk menjadi lebih tangguh dan produktif.

3. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD

Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD menjadi kunci awal keberhasilan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat Kota Semarang.

Realisasi kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang tergambar pada tabel berikut:

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2024			Realisasi tahun 2023
			Target	Realisasi	Satuan	
1.	Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob	Persentase kawasan banjir.	2,26	2,23	Persen	2,34
		Persentase kawasan rob.	1,08	1,06	Persen	1,09
2.	Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantap.	93,50	93,27	Persen	93,004
		Persentase jembatan dalam kondisi baik.	86,05	91,90	Persen	86,00
3.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	77,20	77,35	Skor 1 - 100	77,05

Untuk realisasi indikator kinerja program terangkum dalam tabel berikut:

Kode	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
			Target	Realisasi	Satuan	
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum	100	100	%	100
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan dinas pekerjaan umum	100	100	%	100
		Persentase peningkatan kemampuan ASN dinas Pekerjaan Umum	100	100	%	100
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	98,15	98,33	%	97,86
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	66,00	66,00	%	65,00
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kualitas Infrastruktur jalan jembatan	74,90	92,58	%	74,50

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja antara lain:

Proses pengadaan tanah untuk pelebaran dan peninggian Jembatan Kali Beringin mengalami kendala akibat adanya perbedaan persepsi dengan pemilik lahan mengenai luas bidang tanah yang akan dibebaskan. Pemilik lahan mengajukan tuntutan agar seluruh bidang tanah yang terdampak proyek dibebaskan.

Dan langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh ialah:

Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan upaya negosiasi ulang dengan pemilik lahan untuk mencari titik temu terkait luas tanah yang akan dibebaskan. Dalam proses negosiasi ini, tim teknis akan melibatkan pihak terkait untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kepentingan semua pihak.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	IV
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Dasar Hukum.....	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
1.3 Isu Strategis dan Permasalahan	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Visi dan Misi	3
2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	4
2.3 Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022	
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	7
3.2 Analisis Capaian Kinerja	8
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	11
3.4 Analisis Efisiensi Sumberdaya	15
3.5 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut	17
BAB IV PENUTUP	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah Kota Semarang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum. Dasar hukum organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, dan Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, dan Bidang Pendayagunaan Infrastruktur;
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, Bidang Pendayagunaan Infrastruktur dan UPTD;
4. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
5. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, dan Bidang Pendayagunaan Infrastruktur;
6. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;

7. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, Bidang Pendayagunaan Infrastruktur dan UPTD;
8. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, Bidang Pendayagunaan Infrastruktur dan UPTD;
9. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 ISU STRATEGIS DAN BERBAGAI PERMASALAHAN

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, hasil telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, hasil telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah, hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka dirumuskan isu strategis pembangunan Kota Semarang melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan dari perkotaan hingga ke pelosok perdesaan belum memadai dan perlu peningkatan untuk kelancaran mobilitas barang dan manusia serta aksesibilitas wilayah.
2. Belum optimalnya fungsi drainase gorong-gorong mengakibatkan timbulnya genangan dan mencegah terjadinya banjir.
3. Kondisi dan fungsi jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya perlu perbaikan untuk mencegah terjadinya kebocoran air.
4. Pelayanan kepada masyarakat agar dapat diterapkan sesuai dengan standar pelayanan publik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 VISI DAN MISI

Sesuai dengan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam penyusunan Kebijakan, Program dan Kegiatan, maka Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mengacu pada visi dan misi Walikota Semarang terpilih yaitu,

“Terwujudnya Kota Semarang Yang Semakin Hebat yang Berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI Berbhinneka Tunggal Ika”

- a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial;
- b. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi pancasila;
- c. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan;
- d. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota;
- e. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, dalam mewujudkan misi ke-empat **“Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota”** tersebut Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang melaksanakan tiga program yaitu:

1. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

- a. Mengubah air dari masalah (banjir dan rob) menjadi potensi (water as leverage);
 - b. Smart Water Management.
2. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
 - a. Penghijauan sempadan sungai semarang.
 3. Program Peningkatan Konektivitas Wilayah
 - a. Rintisan Semarang Outer Ring Road (Mangkang-Mijen) dan Middle Ring Road (Jalan Gajah)
 - b. Pembangunan akses perguruan tinggi (Sronдол-Sekaran, Undip-Jangli-Mrican, Sekaran-Tinjomoyo)

2.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan rumusan tersebut maka ditentukan Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagaimana berikut:

**Tabel 2.2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang**

Visi: “Terwujudnya Kota Semarang Yang Semakin Hebat yang Berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI Berbhinneka Tunggal Ika”			
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.	1. Meningkatkan Manajemen Sumber Daya Air yang Berkelanjutan.	1. Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob.	1. Persentase kawasan banjir; 2. Persentase kawasan rob.
	2. Terwujudnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap.	1. Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan; 2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD.	1. Persentase jalan dalam kondisi mantap; 2. Persentase jembatan dalam kondisi baik; 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

2.3 PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang direncanakan sedangkan Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan juga merupakan aspek operasional nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran. Secara umum indikator kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob	1. Persentase kawasan banjir	2,26%
		2. Persentase kawasan rob	1,08%
2.	Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan	1. Persentase jalan dalam kondisi mantap	93,50%
		2. Persentase jembatan dalam kondisi baik	86,05%
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	77,20%

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai, yang mencakup kebijakan, program dan kegiatan. Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota sebagai pemberi amanah kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tabel 3.

**Alokasi Anggaran Program Kegiatan Tahun 2024
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang**

	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	DINAS PEKERJAAN UMUM		
	DINAS PEKERJAAN UMUM		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	107.120.035.673	23,60
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	45.885.383.876	10,11
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	62.418.544.505	13,75
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	151.284.574.163	33,33
	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I		
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2.933.782.512	0,65
	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah IV		-
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2.358.688.887	0,52
	UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum		
7	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	26.970.981.812	5,94
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	10.576.235.876	2,33
	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah II		
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2.955.293.074	0,65
	UPTD Peralatan dan Perbengkelan		
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	37.849.385.533	8,34
	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III		
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	3.588.359.166	0,79
	JUMLAH	453.941.265.077	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Evaluasi Kinerja dilakukan dengan cara menghitung Pengukuran Kinerja dari pelaksanaan kegiatan / program/ kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Dalam pengukuran evaluasi kinerja, selain dari aspek keuangan juga dikaji melalui aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Evaluasi yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang untuk input meliputi :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Dana baik DAU maupun DAK yang terdiri dari:
 - a. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung
 - b. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung

Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.
Capaian Kinerja Tahun 2024
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI
NO	URAIAN	NO	URAIAN			
1		2		3	4	5
1	Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob	1	Persentase kawasan banjir	%	2,26	2,23
		2	Persentase kawasan rob	%	1,08	1,06
2	Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan	1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	93,50	93,27
		2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	86,05	91,90

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan pada Tabel Capaian Kinerja Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang secara rinci capaian masing-masing sasaran strategis dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

1) Terwujudnya Manajemen Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan

Optimalisasi sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob di Kota Semarang

INDIKATOR KINERJA		Tahun 2024			Realisasi tahun 2023
		Target	Realisasi	Satuan	
1.	Persentase kawasan banjir.	2,26	2,23	101,3	2,34%
2.	Persentase kawasan rob.	1,08	1,06	101,8	1,09%

Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil mengurangi persentase kawasan banjir dari yang ditargetkan 2,26% mencapai 2,23%, atau berhasil melampaui target sejumlah 101,3%. Sedangkan hasil capaian kinerja untuk persentase kawasan rob adalah berhasil mengurangi dari yang ditargetkan 1,08% mencapai 1,06% atau berhasil mencapai target sejumlah 101,8%.

2) Terwujudnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap

Meningkatnya fungsi dan manfaat sarana dan prasarana jalan, jembatan yang optimal

INDIKATOR KINERJA		Tahun 2024			Realisasi tahun 2023
		Target	Realisasi	Satuan	
1.	Persentase jalan dalam kondisi mantap.	93,50	93,27	99,75	93,004
2.	Persentase jembatan dalam kondisi baik.	86,05	91,90	106,7	86,00

Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai untuk persentase jalan dalam kondisi mantap dari yang ditargetkan 93,50% mencapai 93,27%, atau mencapai target sejumlah 99,75%. Sedangkan hasil capaian kinerja untuk persentase jembatan dalam kondisi baik dari yang ditargetkan 86,05% mencapai 91,90% atau berhasil mencapai target sejumlah 106,7%.

Capaian pada urusan Pekerjaan Umum dicapai melalui beberapa kegiatan yang berhasil dilaksanakan, antara lain :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		Target	Realisasi	%	
1.	Persentase perencanaan dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum	100	100	100	100
2.	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan dinas pekerjaan umum	100	100	100	100
3.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas PU	100	100	100	100
4.	Persentase peningkatan kemampuan ASN dinas Pekerjaan Umum	100	100	100	100

Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target 100% untuk semua indikator kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan tercapainya target tersebut mendukung kelancaran kinerja OPD dalam melaksanakan program kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai dengan terlaksananya sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta terpenuhinya belanja jasa penunjang administrasi perkantoran, pengadaan peralatan gedung kantor, pemeliharaan berkala gedung kantor dan kendaraan operasional dinas, sub kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat serta Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

2) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		Target	Realisasi	%	
1.	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	98,15	98,33	100,18	97,86

Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai untuk Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pengendali Banjir Dan Rob dari yang ditargetkan 98,15% mencapai 98,33%.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai dengan berhasil dilaksanakannya Pembangunan Stasiun Pompa Banjir, Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir, Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir, Operasi

dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi, Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir, Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya, Normalisasi/Restorasi Sungai, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, serta Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa.

3) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		Target	Realisasi	%	
1.	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	66,00	66,00	100	65,00

Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai untuk Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dari yang ditargetkan 66,00% mencapai 66,00%

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai dengan berhasil dilaksanakannya sub kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan, sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan dan sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan.

4) PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		Target	Realisasi	%	
1.	Tingkat Kualitas Infrastruktur jalan jembatan	74,90	92,58	123,60	74,50

Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai untuk Tingkat Kualitas Infrastruktur jalan jembatan dari yang ditargetkan 74,90% mencapai 92,58%

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai dengan berhasil dilaksanakannya sub kegiatan Pengelolaan Leger Jalan, sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, sub kegiatan Pembangunan Jalan, sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan, sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan, sub kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa, sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan, sub kegiatan Rehabilitasi Jembatan, sub kegiatan Pembangunan Jembatan, sub kegiatan Survey

Kondisi Jalan/Jembatan, sub kegiatan Rehabilitasi Jembatan, sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan.

1.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mencapai Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada Tahun 2024 didukung dengan anggaran yang direncanakan sejumlah **Rp. 453.941.265.077,-** dan terealisasi sejumlah **Rp 388.262.814.069,-** dengan capaian kinerja anggaran sebesar **85,53%**.

Capaian Kinerja Keuangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.

**Rincian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang**

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	DINAS PEKERJAAN UMUM			
	<i>DINAS PEKERJAAN UMUM</i>	366.708.538.217	309.314.820.987	84,35
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	107.120.035.673	77.492.774.877	72,34
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.395.627	66.098.400	81,21
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.129.164	32.480.500	98,04
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.200.000	1.335.950	41,75
01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.200.000	1.927.450	60,23
.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.050.000	4.676.500	66,33
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000	0	0
01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4.525.000	3.182.000	70,32
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.291.463	22.496.000	88,95
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.156.200.000	17.572.563.152	96,79
.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.621.140.000	17.175.298.952	97,47
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	522.060.000	384.510.000	73,65
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	2.960.000	98,67
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	5.000.000	4.922.900	98,46
02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	4.871.300	97,43
2.03	Administrasi Barang Milik Daerah	11.100.000	10.963.500	98,77

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	pada Perangkat Daerah			
03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.600.000	6.566.000	99,48
03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.500.000	4.397.500	97,72
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	5.103.500	51,04
05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000	2.936.000	58,72
05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.000.000	2.167.500	43,35
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.441.398.723	3.834.831.657	86,34
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	220.000.000	215.700.661	98,05
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.297.558.038	2.111.139.978	91,89
06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75.000.000	64.813.770	86,42
06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	249.206.919	186.331.595	74,77
06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	4.962.255	99,25
06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	226.408.766	203.858.340	90,04
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	591.075.000	351.872.681	59,53
06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	777.150.000	696.152.377	89,58
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	425.517.479	370.449.812	87,06
07.05	Pengadaan Mebel	125.517.479	92.041.400	73,33
07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000	278.408.412	92,80
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.250.248.617	12.707.702.032	89,18
08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.099.000	10.670.000	96,13
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.643.168.617	6.936.353.716	90,75
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.595.981.000	5.760.678.316	87,34
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.744.175.227	42.925.062.824	61,55
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	2.542.413.300	1.678.706.835	66,03
09.05	Pemeliharaan Mebel	50.904.000	50.685.000	99,57
09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	270.255.880	252.383.000	93,39
09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.795.359.453	1.716.676.083	95,62
09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	65.085.242.594	39.226.611.906	60,27
02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	45.885.383.876	40.279.986.155	87,78
2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai(Ws) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	41.835.767.294	36.550.802.269	87,37
01.13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	8.000.000.000	7.249.695.567	90,62
01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	2.406.732.671	2.267.216.982	94,20

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
01.28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	8.500.000.000	7.486.924.120	88,08
01.82	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	1.481.844.039	1.471.978.430	99,33
01.85	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	17.247.125.904	14.152.944.401	82,06
01.89	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	750.891.680	710.592.250	94,63
01.93	Normalisasi/Restorasi Sungai	3.000.000.000	2.777.303.651	92,58
01.128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan	449.173.000	434.146.868	96,65
2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.049.616.582	3.729.183.886	92,09
02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.945.972.082	3.632.810.023	92,06
02.35	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	103.644.500	96.373.863	92,99
06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	62.418.544.505	50.724.370.341	81,26
2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	62.418.544.505	50.724.370.341	81,26
01.24	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	34.278.856.000	26.083.256.306	76,09
01.30	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1.098.158.000	1.040.005.840	94,70
01.31	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	27.041.530.505	23.601.108.195	87,28
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	151.284.574.163	140.817.689.614	93,08
2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	151.284.574.163	140.817.689.614	93,08
01.28	Pengelolaan Leger Jalan	454.352.000	431.603.032	94,99
01.29	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.379.862.500	2.329.308.771	97,88
01.32	Pembangunan Jalan	7.491.600.000	6.582.781.259	87,87
01.33	Rekonstruksi Jalan	6.746.673.000	6.525.959.985	96,73
01.34	Pemeliharaan Berkala Jalan	83.061.389.518	82.400.322.395	99,20
01.36	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	2.776.492.343	2.051.923.042	73,90
01.38	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.239.819.590	1.068.790.576	86,21
01.39	Rehabilitasi Jembatan	9.967.600.000	7.102.476.822	71,26
01.40	Pembangunan Jembatan	800.000.000	561.143.720	70,14
01.43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.256.700.000	1.217.834.504	96,91
01.44	Rehabilitasi Jalan	24.604.920.046	20.642.242.928	83,89
01.46	Pemeliharaan Rutin Jalan	10.505.165.166	9.903.302.580	94,27

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I	2.933.782.512	2.824.021.936	96,26
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2.933.782.512	2.824.021.936	96,26
2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	2.933.782.512	2.824.021.936	96,26
01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.933.782.512	2.824.021.936	96,26
	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah IV	2.358.688.887	2.271.519.279	96,30
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2.358.688.887	2.271.519.279	96,30
2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	2.358.688.887	2.271.519.279	96,30
01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.358.688.887	2.271.519.279	96,30
	UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum	37.547.217.688	33.047.298.148	88,02
06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	26.970.981.812	23.049.061.158	85,46
2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung deng	26.970.981.812	23.049.061.158	85,46
01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	26.970.981.812	23.049.061.158	85,46
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	10.576.235.876	9.998.236.990	94,53
2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	10.576.235.876	9.998.236.990	94,53
01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	10.576.235.876	9.998.236.990	94,53
	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah II	2.955.293.074	2.874.768.417	97,28
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2.955.293.074	2.874.768.417	97,28
2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	2.955.293.074	2.874.768.417	97,28
01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.955.293.074	2.874.768.417	97,28
	UPTD Peralatan dan Perbengkelan	37.849.385.533	34.708.512.841	91,70
06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	37.849.385.533	34.708.512.841	91,70
2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung deng	37.849.385.533	34.708.512.841	91,70
01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	37.849.385.533	34.708.512.841	91,70
	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III	3.588.359.166	3.221.872.461	89,79
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	3.588.359.166	3.221.872.461	89,79
2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	3.588.359.166	3.221.872.461	89,79
01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.588.359.166	3.221.872.461	89,79

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat efisiensi penggunaan anggaran, meskipun dengan keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) dan sarana prasarana yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang semua target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

3.4 ANALISIS EFISIENSI SUMBERDAYA

Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama tidak terlepas dari adanya dukungan Sumber Daya. Penggunaan sumber daya dibedakan menjadi 3 yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran. Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada didalamnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang didukung oleh 138 orang pegawai ASN dan 454 orang pegawai Non ASN serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Sedangkan untuk sarana dan prasarana penunjang kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah sebagai berikut:

Tabel 6.
Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2024

No	Uraian Jenis Aset	2021			2022		
		Jumlah (Unit)	Kondisi Baik (Unit)	%	Jumlah (Unit)	Kondisi Baik (Unit)	%
1	Gedung Kantor	68	68	100	68	68	100
2	Alat-alat Berat						
	a. Asphal Finisher	1	1	100	1	1	100
	b. Aspal Sprayer	2	2	100	2	2	100
	c. Buldozer	2	2	100	2	2	100
	d. Baby Roller	2	1	67,5	2	1	67,5
	e. Col Milling Machine	1	1	89,6	1	1	89,6
	f. Crane Gantung	1	1	50	1	1	49
	g. Excavator	10	10	100	10	10	100
	h. Tandem Roller	12	8	66,6	12	8	66,6
	i. Tyre Roller	1	1	70	1	1	70
	j. Stamper	2	2	100	2	2	100
	k. Towed Scraper	4	4	100	4	4	100
	l. Wheel Excavator	9	9	98,5	9	9	98,5
	m. Vibration Roller	2	2	100	2	2	100
3	Alat-alat Angkut						
	a. Mobil Pick Up	36	36	92,5	40	40	94,7
	b. Dump Truck	103	72	69,9	103	72	69,9
	c. Roda Dua	51	41	80,39	51	41	80,39

	e. Mobil Station	22	17	77,2	22	17	77,2
4	Alat-alat lainnya						
	a. Komputer PC	41	32	78,04	59	50	84,7
	b. Laptop	61	28	45,9	65	32	49,2
	c. Printer	64	39	60,9	81	56	69,1
	d. Sound System	5	5	100	5	5	100
	e. Filing Kabinet	43	43	100	43	43	100
	f. Theodolit	3	3	100	3	3	100

3.5 PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, setiap tahunnya Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang menghadapi permasalahan baik eksternal maupun internal.

Secara umum kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah dikarenakan adanya kendala dalam proses pengadaan tanah untuk pelebaran dan peninggian Jembatan Kali Beringin akibat adanya perbedaan persepsi dengan pemilik lahan mengenai luas bidang tanah yang akan dibebaskan. Pemilik lahan mengajukan tuntutan agar seluruh bidang tanah yang terdampak proyek dibebaskan.

Tindak lanjut yang dilaksanakan terkait permasalahan tersebut adalah akan dilakukan upaya negosiasi ulang dengan pemilik lahan untuk mencari titik temu terkait luas tanah yang akan dibebaskan. Dalam proses negosiasi ini, tim teknis akan melibatkan pihak terkait untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kepentingan semua pihak.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP juga merupakan bentuk laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) didasarkan pada hasil-hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang pelaksanaannya disesuaikan dengan Dasar Anggaran Satuan Kerja termasuk dana Anggaran Tambahan (APBD – Perubahan) terdiri dari Program dan Kegiatan SKPD.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen pegawai dan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan seluruh Kota Semarang.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang antara lain:

1. Meningkatkan optimalisasi sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob di Kota Semarang.
2. Meningkatkan kondisi jalan dan jembatan.
3. Meningkatkan fungsi dan manfaat jalan dan jembatan serta infrastruktur pendukungnya.

Dengan demikian diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah sehingga tidak hanya wacana semata untuk mewujudkan infrastruktur yang

memadai bagi masyarakat, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam pembangunan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat. Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan pihak-pihak terkait harus dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*.